

**PEMIMPIN NON-MUSLIM MENURUT IBNU TAIMIYAH
DAN RELEVANSINYA DENGAN KONTROVERSI PILKADA
DI DKI JAKARTA TAHUN 2017**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

LULU NADZIROH
NIM. 13370062

PEMBIMBING:

Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Kontroversi mengenai pemimpin non-Muslim di negara Indonesia masih menjadi perbincangan yang hangat hingga sekarang. Terlebih lagi ketika terjadi pemilihan kepala daerah, seperti yang kemarin terjadi ketika adanya pilkada serentak di Indonesia pada bulan Februari 2017. DKI Jakarta tampil sebagai daerah yang mempunyai calon gubernur non-Muslim yaitu Basuki Tjahaya Purnama atau yang biasa di panggil dengan Ahok. Munculnya Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta menimbulkan reaksi masa yang tidak kunjung berhenti, dikarenakan terjadi beberapa kali demo yang berlangsung di Jakarta oleh sebagian masyarakat Indonesia dengan alasan menolak Ahok atas dugaan penistaan agama yang dilakukannya beberapa waktu yang lalu. Kaitannya dengan pemimpin non-Muslim tersebut agaknya Ibnu Taimiyah memiliki pendapatnya sendiri yaitu “Allah mendukung pemimpin adil meskipun Kafir daripada pemimpin zalim meskipun Mu’min”. dengan mengutip pernyataan Ibnu Taimiyah tersebut, bagaimana jika hal tersebut dikontekskan dengan pilkada DKI Jakarta tahun 2017 kemarin, dan dalam kondisi apa Ibnu Taimiyah membolehkan non-Muslim untuk menjadi pemimpin dalam mayoritas penduduk yang beragama Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang pandangan Ibnu Taimiyah terhadap pemimpin non-Muslim. Dalam hal ini bagaimana pernyataan Ibnu Taimiyah di atas jika disesuaikan dengan konteks DKI Jakarta saat ini, dan bagaimana jika konteksnya non-Muslim tersebut dalam keadaan darurat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang bersifat deskriptif analisis, dan menggunakan pendekatan normatif melalui teks dalam al-Qur’an dan pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, lalu secara empiris dikaitkan dengan fenomena pemimpin non-Muslim di DKI Jakarta.

Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan, dapat disimpulkan bahwa, pendapat Ibnu Taimiyah mengenai boleh tidaknya non-Muslim menjadi pemimpin tidak secara rinci dijelaskan, namun Ibnu Taimiyah tetap mengutamakan keadilan. Jika dikontekskan dengan pilkada DKI Jakarta, maka hal tersebut tidak dapat diterapkan, karena menurut Ibnu Taimiyah non-Muslim dapat menjadi pemimpin ketika dalam keadaan darurat serta tidak melihat dari latar belakangnya namun tetap mendahulukan keadilan dan selama kepemimpinannya membawa manfaat. Namun jika dalam keadaan normal non-Muslim tetap tidak boleh menjadi pemimpin selama masih terdapat calon yang dapat dipilih sebagai pemimpin dan memenuhi persyaratan.

Kata Kunci: Pemimpin non-Muslim, dalam keadaan darurat, adil, DKI Jakarta.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lulu Nadziroh
NIM : 13370062
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : PEMIMPIN NON-MUSLIM MENURUT IBNU
TAIMIYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN
KONTROVERSI PILKADA DI DKI JAKARTA

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Mei 2017

Yang menyatakan



Lulu Nadziroh
NIM. 13370062

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lulu Nadziroh
NIM : 13370062
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa pas foto yang diserahkan dalam daftar munaqosyah tersebut benar-benar pas foto saya, dan saya berani menanggung resiko dari pas foto tersebut. Jika di kemudian hari terdapat suatu hal, saya tidak akan menyalahkan pihak Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 16 Mei 2017

Yang Menyatakan



Lulu Nadziroh

NIM. 13370062

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Lulu Nadziroh

NIM : 13370062

Judul : “Pemimpin Non-Muslim Menurut Ibnu Taimiyah dan Relevansinya dengan Kontroversi Pilkada di DKI Jakarta”

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 Mei 2017

Pembimbing



Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-203/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : PEMIMPIN NON-MUSLIM MENURUT IBNU TAIMIYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KONTROVERSI PILKADA DI DKI JAKARTA TAHUN 2017

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LULU NADZIROH
Nomor Induk Mahasiswa : 13370062
Telah diujikan pada : Senin, 22 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

Drs. H. Oman Fathurrohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 22 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moch. Ngib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**Sesungguhnya Dibalik Kesusahan akan Datang Kebahagiaan
Berusaha Menjaga untuk Tetap Istiqomah dan Belajar dari
Pengalaman Hidup**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya Ini Khusus Aku Persembahkan Kepada:

Bapak Mokhammad Sawadi Dan Ibu Jonani

Yang Selalu Mendo'akan Atas Keberhasilanku

Dan untuk

Kedua Adikku Tersayang

'Afifatun Niswah dan Zaqi Khasan

Yang senantiasa Memberikan Semangatnya Kepada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله .

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah, serta inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pemimpin Non-Muslim menurut Ibnu Taimiyah dan Relevansinya dengan Kontroversi Pilkada di DKI Jakarta”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad saw yang telah membawa umat-Nya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini.

Ucapan terima kasih penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurrohman SW., M. Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan selama membimbing dan secara ikhlas serta sabar telah meluangkan waktunya untuk mendukung penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Tata Negara yang senantiasa memantau dan memberikan motivasinya kepada para mahasiswanya dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen yang telah memberikan pengetahuan yang dimiliki selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staff karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Keluargaku tercinta khususnya Bapak Mokhammad Sarwadi dan Ibu Isnani serta adik-adikku 'Afifatun Niswah dan Zaqi Khasan, yang telah memberikan do'a, motivasi dan dukungan yang tiada henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini, serta Mas Hafid Nurrohman yang selalu memberikan nasehatnya untuk bersabar dalam mengerjakan tugas skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 yang telah memberikan kesan, canda, tawa dan perjuangan selama masa-masa kuliah, dan sahabat unyu-unyu (Akhmad Thole Bainher, Sururum Marfu'ah, Beni Rinto Wahlujo Atmaja, Ihsanuddin, dan Herdy Hariyanto S.) yang saling memberi motivasi dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, meskipun

terkadang terjadi salah paham, canda tawa, kesedihan, kesusahan, namun dibalik itu semua terdapat kebahagiaan yang begitu indah.

10. Teman-teman KKN kelompok 96 yang sudah memberikan *support*-nya selama penulisan skripsi ini.

11. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah swt. penyusun berserah diri, semoga segala amal baik yang diberikan kepada penyusun mendapat balasan dari Allah swt. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya, namun penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Mei 2017

Penulis,



Lulu Nadzirah

NIM. 13370062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	B ’	b	Be
ت	T ’	t	Te
ث	S ’		Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	H ’		Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh ’	kh	Ka dan ha
د	D l	d	De
ذ	Z l		Zet (dengan titik di atas)
ر	R ’	r	Er
ز	Za’	z	Zet
س	S̄in	s	Es
ش	Syīn	sy	Es dan ye
ص	S d		Es (dengan titik di bawah)
ض	D d		de (dengan titik di bawah)
ط	,		te (dengan titik di bawah)

ز	'		zet (dengan titik di bawah)
س	'ain		koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	F '	f	Ef
ق	Q f	q	Qi
ك	K f	k	Ka
ل	L m	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	N n	n	En
و	W wu	w	We
هـ	H	h	Ha
ء	Hamzah		Apostrof tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Y '	y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	Muta'addidah
عَدَّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
------	---------	--------

علة	Ditulis	'illah
-----	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dan dhamah ditulis u.

Contoh : ditulis *jalasa*

 ditulis *ariba*

 ditulis *buniya*

E. Vokal panjang

A panjang ditulis , i panjang ditulis , u panjang ditulis , masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : ditulis *k na*

 تَلْمِيذٌ ditulis *tilm un*

 ditulis *gaf run*

F. Vokal rangkap

Fathah + y ' mati ditulis ai.

Contoh : بَيْنَ ditulis *baina*

Fathah + w wu mati ditulis au.

Contoh : قَوْلَ ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

Contoh : اَوْ أُ ditulis *a u*

H. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis *al-*

Contoh : الْمَدْرَسَةُ ditulis *al-madrasah*

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : السَّمْعُ ditulis *as-sam ‘*

I. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : مُحَمَّدِيَّةٌ ditulis *mu ammadiyyah*

J. Ta' marbutah di akhir kata

Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh : مَكْتَابَةُ الْجَمِيْعَاتِ ditulis *maktabat al-j mi'at*

Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : سَبْرًا رَاحَةً ditulis *sabb rah*

K. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata

Contoh : كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *kar mah al-auly* ’

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

Contoh : شِدِّينِ ditulis *khulaf ’ur r syid n*

L. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II: PEMIMPIN DALAM ISLAM.....	19
A. Pengertian Pemimpin	19
B. Syarat-Syarat Pemimpin.....	24
BAB III : WACANA IBNU TAIMIYAH DAN PEMIMPIN NON-MUSLIM.....	31
A. Riwayat Hidup Ibnu Taimiyah.....	31
1. Latar Belakang Ibnu Taimiyah.....	31
2. Pendidikan Ibnu Taimiyah	32

3. Perjalanan Hidup Ibnu Taimiyah	37
4. Ulasan Karya Ibnu Taimiyah	39
B. Pemimpin Non-Muslim menurut Ibnu Taimiyah.....	41
C. Pemimpin Non-Muslim menurut Beberapa Ulama.....	46
1. Ulama yang Menolak Pemimpin Non-Muslim	46
2. Ulama yang Membolehkan Pemimpin Non-Muslim	51
BAB IV : KONTROVERSI PEMIMPIN NON-MUSLIM DALAM	
KONTEKS KEINDONESIAAN.....	56
A. Pemimpin Non-Muslim di Indonesia dari Masa ke Masa.....	56
B. Kontroversi Non-Muslim dalam Pilkada di DKI Jakarta.....	59
C. Non-Muslim dalam Keadaan Darurat	64
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Terjemahan	I
Lampiran II	: Curriculum Vitae	III



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia tidak pernah bisa terlepas dari sebuah sistem yang mempengaruhi kehidupannya. Sadar dan tidak sadar manusia selalu bertindak sesuai dengan sistem yang melingkupi kehidupannya, seperti sistem ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Oleh karena itu, maka diperlukan suatu objek tertentu untuk mengatur sistem-sistem tersebut agar berjalan sebagaimana mestinya. Objek di sini yang dimaksud adalah seorang pemimpin. Di mana keberadaan pemimpin sangat dibutuhkan dalam suatu tatanan masyarakat untuk membuat masyarakatnya menjadi tertib. Kata “pemimpin” tidak jarang kita dengar dalam berbagai bidang kehidupan manusia, seperti halnya dalam ranah pemerintahan.

Pemimpin adalah seseorang yang dipilih oleh rakyat demi mengatur dan mengurus kepentingan bersama, dan dipercaya menjadi seorang pemimpin. Seseorang yang dinobatkan sebagai pemimpin negara mempunyai tugas dan kewajiban antara lain, yaitu, memelihara agama, ketahanan dan keamanan, menegakkan hukum, serta mengatur keuangan¹. Dalam hal ini pemimpin yang dimaksud adalah kepala pemerintahan, baik itu konteksnya kepala negara maupun gubernur.

¹ M. Suryadinata, “Kepemimpinan Non-Muslim dalam al-Qur’an: Analisis terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim”, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Volume 2, Nomer 3, Januari-Juni 2015, hlm 243.

Berbicara mengenai pemimpin, tanggal 15 Februari 2017 kemarin, Indonesia telah melaksanakan pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak. Dalam pilkada tersebut siapa saja yang memiliki syarat-syarat tertentu berhak mencalonkan dirinya menjadi pemimpin, baik itu seseorang dari kalangan Muslim maupun non-Muslim, dari kalangan politik atau pengusaha. Kaitannya dengan pilkada serentak tersebut, DKI Jakarta tampil sebagai daerah yang kontroversial. Pasalnya terdapat non-Muslim yaitu Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang mencalonkan dirinya sebagai pemimpin.

Dalam al-Qur'an sendiri terdapat beberapa ayat yang melarang adanya pemimpin berasal dari non-Muslim. Namun dalam ayat tersebut tidak secara spesifik menyebutkan ciri-ciri seprang pemimpin, seperti dalam surat Al-Maidah ayat 51 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ²

Dalam ayat yang lain juga disebutkan bahwa terdapat larangan bagi non-Muslim menjadi seorang pemimpin, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 28.³ Ibnu Taimiyah lebih menekankan konsep keadilan yang ditegakkan dari pada melihat status sang pemimpin, baik dia Muslim atau Kafir boleh saja memimpin selama ditegakkannya pemerintahan yang berkeadilan. Pernyataan Ibnu Taimiyah sendiri dalam tulisannya yaitu:

² Al-Maidah (5) : 51

³ Ali Imran (3) : 28

الله ينصر الدولة العادلة وان كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وان كانت

مؤمنة⁴

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya Islam, namun bukan berarti Indonesia adalah negara Islam. Dengan kata lain, seharusnya hal ini tidak menghambat apabila terdapat sosok calon pemimpin yang berasal dari agama selain Islam, karena dengan negara Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi seperti sekarang ini, siapa pun yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin dapat mencalonkan dirinya sebagai pemimpin.

Dalam buku yang berjudul “*Minoritas Non Muslim di dalam Masyarakat Islam*” karya Yusuf Qardhawi dijelaskan bahwa *ahludz-dzimmah* juga mempunyai hak untuk menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan seperti halnya kaum muslimin, kecuali jabatan-jabatan yang memiliki warna keagamaan seperti jabatan sebagai imam, pemimpin tertinggi negara, panglima tentara, hakim untuk kaum muslimin.⁵

Dijelaskan pula bahwa tugas-tugas pemerintahan di luar bidang-bidang tersebut di atas boleh diserahkan kepada *ahludz-dzimmah*⁶ apabila terpenuhi

⁴ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam aw Wadhifah al-Hukumah al-Islamiyyah*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992), hlm. 3.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Minoritas Non Muslim di dalam Masyarakat Islam*, (Bandung: Karisma, 1994), hlm., 53.

⁶ *Ahludz-dzimmah* di sini yang dimaksud adalah sebutan untuk orang warga negara non-Muslim dalam masyarakat Islami, kata *dzimmah* berarti perjanjian, jaminan dan keamanan (Yusuf Qardhawi, 1994:18-19). Dinamakan demikian karena mereka memiliki jaminan perjanjian (‘*ahd*) Allah dan Rasul-Nya serta jamaah kaum muslimin untuk hidup dengan aman dan tentram dibawah perlindungan Islam dan dalam lingkungan masyarakat Islam. Jadi mereka berada dalam jaminan keamanan kaum muslimin berdasarkan “akad *dzimmah*”. Dengan demikian, *dzimmah* ini memberikan kepada orang-orang non-Muslim suatu hak yang di masa sekarang mirip dengan apa yang disebut sebagai kewarganegaraan politis yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Dengan itu pula mereka memperoleh dan terikat pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban semua

syarat-syarat pada diri mereka seperti kecakapan, kejujuran dan kesetiaan kepada negara. Tentunya mereka itu harus tidak termasuk orang-orang yang memendam rasa dengki dan benci terhadap kaum muslimin.⁷

Terkait pencalonan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta, agaknya Said Aqil Siradj juga memiliki pendapat yang sama dengan Ibnu Taimiyah bahwa “pemimpin Kafir yang adil itu lebih baik daripada pemimpin Muslim tapi zalim”, karena menurutnya seseorang yang mempunyai sifat adil dan jujur sekalipun ia non-Muslim, sah saja dipilih sebagai pemimpin. Akan tetapi pernyataan tersebut tetap merujuk kepada keadilan dan kejujuran yang dimiliki oleh seseorang.⁸ Namun tidak hanya isu pemimpin non-Muslim yang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat, tetapi juga ditambah kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok beberapa waktu yang lalu juga membuat masyarakat semakin gencar menolak Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta.

Pasalnya terjadi beberapa kali aksi demo penolakan Ahok sebagai calon gubernur. Aksi tersebut berlangsung pada tanggal 4 November 2016 yang terjadi di Monumen Nasional (Monas) Jakarta. Aksi selanjutnya terjadi pada tanggal 2 Desember 2016 yang lalu, yang dilaksanakan di sekitar Monas. Aksi tersebut tetap berlangsung, meskipun Ahok sudah berstatus sebagai tersangka dalam kasus

warga negara. Dalam Kamus Arab Indonesia (Ali Mutahar, 2005:189) *ahludz-zimmah* berarti orang-orang yang bukan Muslim, tapi dapat menikmati kebebasan dan perlindungan.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Minoritas Non Muslim*, hlm. 54

⁸ Alhafiz K, *Kontroversi Pemimpin Non-Muslim ini Klarifikasi Pernyataan Kang Said*, <http://www.nu.or.id/post/read/67660/> diakses pada tanggal 23 Mei 2017 pukul 16.01.

penistaan agama. Hal itu tidak menyurutkan sejumlah ormas untuk kembali turun ke jalan mendesak pemerintah agar menangkap Ahok.⁹

Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pendapat Ibnu Taimiyah mengenai pemimpin non-Muslim. Dikaitkan dengan isu kontroversi pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang menuai banyak pro dan kontra mengenai calon gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), dan untuk menjelaskan mengenai pendapat Ibnu Taimiyah terhadap pemimpin non-Muslim di Indonesia penulis akan menganalisa dengan menggunakan teori politik profetik Kuntowijoyo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dijawab pada penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Taimiyah tentang pemimpin non-Muslim?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pemimpin non-Muslim dengan isu pilkada di DKI Jakarta tahun 2017.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Menjelaskan pendapat Ibnu Taimiyah tentang pemimpin non-Muslim.
2. Menjelaskan relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pemimpin non-Muslim dengan isu pilkada di DKI Jakarta tahun 2017.

⁹ Pijar Anugerah, *Lima Hal Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Unjuk Rasa 2 Desember* <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia>, akses tanggal 20 Maret 2017 pukul 13.12.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Memberikan wawasan baru mengenai pemimpin non-Muslim dalam pandangan Ibnu Taimiyah dalam konteks Indonesia masa kini.
2. Menyumbang keilmuan dalam bidang hukum tata negara.
3. Memberikan pengetahuan tentang pendapat tokoh dalam kaitannya dengan hukum tata negara dan konteksnya di Indonesia.
4. Memberikan pengetahuan mengenai kebolehan dan penolakan pemimpin non-Muslim dalam mayoritas penduduk yang beragama muslim di Indonesia yang berkaitan dengan konteks Indonesia saat ini yang dikaitkan dengan isu pilkada di DKI Jakarta.

D. Telaah Pustaka

Studi mengenai pemimpin non-Muslim kini semakin banyak dibahas oleh beberapa kalangan, dari beberapa tulisan penulis berhasil menemukan skripsi-skripsi yang berkaitan dengan pemimpin non-Muslim tersebut diantaranya:

Skripsi karya Ardhan Wahyu Firmansyah yang berjudul “Pemimpin Non-Muslim di Indonesia Menurut Pandangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (2012-2013)”.¹⁰ Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Sifat penelitiannya adalah bersifat deskriptif kualitatif. Skripsi ini membahas mengenai pandangan beberapa mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terhadap pemimpin non-Muslim, ada yang berpikir secara tekstual, di mana mereka tidak menerima

¹⁰ Ardhan Wahyu Firmansyah, “Pemimpin Non-Muslim di Indonesia Menurut Pandangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (2012-2013)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2013), hlm. 44-51.

adanya pemimpin non-Muslim sesuai dengan ayat-ayat yang ada dalam al-Qur'an tentang larangan memilih pemimpin non-Muslim. Namun ada juga yang berpikir secara kontekstual, yang mana beberapa dari mereka melihat fenomena mengenai pemimpin non-Muslim di Indonesia berdasarkan teks al-Qur'an namun disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada masa kini. Namun ada juga yang berpikir secara moderat mengenai pemimpin non-Muslim di negara Indonesia.

Skripsi karya Wahyu Naldi yang berjudul, "Penafsiran terhadap Ayat-Ayat Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim dalam Al-Qur'an". Dalam skripsi ini lebih dijelaskan mengenai ayat-ayat dalam al-Qur'an yang melarang adanya pemilihan terhadap pemimpin non-Muslim. Penekanannya terdapat pada perbedaan penafsiran antara Quraish Shihab dengan Sayyid Quttub.¹¹ Dari segi penyajian Sayyid lebih bernuansa pergerakan yang dibungkus dengan bahasa sastra dan cenderung lebih tegas bahkan keras. Dalam memahami ayat-ayat tersebut Sayyid cenderung tekstualis. Dibandingkan dengan Quraish Shihab yang lebih terbuka penuh toleran dan memahami ayat-ayat tersebut dengan holistik dan kontekstualis.¹² Penafsiran Quraish lebih relevan dengan konteks Indonesia saat ini karena masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural, yang bertumpu pada ideologi pancasila dan UUD 1945 yang mengharuskan bekerjasama dengan cara menjalin persatuan dan kesatuan untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan bersama di dalam bernegara. Dijelaskan pula mengenai pendapat beberapa ulama

¹¹ Wahyu Naldi, "Penafsiran terhadap Ayat-ayat Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim dalam Al-Qur'an: Studi Komparasi antara M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb" *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, (2015), hlm. 73-90.

¹² *Ibid.*, hlm. 144.

yang melarang maupun yang memperbolehkan adanya pemimpin non-Muslim.¹³ Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Buku dengan judul “*Presiden Non-Muslim di Negara Indonesia (Tinjauan dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia)*” hasil penelitian dari DR. Mujar Ibnu Syarif. Dalam bukunya membahas mengenai dapat atau tidaknya non-Muslim menjadi presiden di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini tidak hanya dilihat dari kacamata teologis, di mana dalam kaitannya dengan presiden non-Muslim di negara Indonesia menimbulkan kontroversi karena baik dari al-Qur’an dan al-Sunnah yang merupakan dua sumber utama hukum Islam ditemukan dalil-dalil yang melarang umat Islam memilih pemimpin non-Muslim, namun dalam hal lain ditemukan juga dalil-dalil yang membolehkannya.¹⁴ Penelitian ini merupakan riset pustaka (*Library Research*) yang dilengkapi dengan wawancara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologis filosofis.¹⁵

Skripsi karya Abd. Rokhim, yang berjudul “Hak dan Kewajiban Politik Non-Muslim dalam Konsep Khilafah Menurut Taqiyyuddin An-Nabhani”. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban politik non-Muslim dalam khilafah, bahwa negara tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap rakyat atas dasar agama, kelompok, jenis kelamin, atau yang lain. Islam hanya mengaitkan kepada negara, kewajiban untuk menegakkan hukum-hukum syara’.

¹³ *Ibid.*, hlm. 28-43.

¹⁴ Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non-Muslim di Negara Muslim (Tinjauan dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia)*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hlm 1.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 11.

Namun meskipun non-Muslim tidak memiliki kewajiban politik untuk menegakkan Islam mereka tetap diwajibkan untuk membayar *jizyah* dan mematuhi hukum sipil Islam sebagai warga negara yang pasif.¹⁶ Konsep khilafah dalam pandangan an-Nabhani adalah kepemimpinan umum bagi seluruh umat Islam di dunia, untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.¹⁷ Menurut an-Nabhani negara Islam atau khilafah tetap menerima non-Muslim sebagai warga negaranya, namun kaitannya dengan hak dan kewajiban antara warga non-Muslim dan Muslim tentunya berbeda prosentasenya. Hal ini juga termasuk dalam berpolitik, bahwa non-Muslim memiliki hak yang lebih sedikit dalam pemerintahan. Skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*).

E. Kerangka Teori

Pilar dari Ilmu Sosial Profetik menurut Kuntowijoyo itu ada tiga, yaitu *amar ma'rūf* (humanisasi), *nahi munkar* (liberasi), dan *tu'minūna billāh* (transendensi).¹⁸ Penelitian sosial berdasar Ilmu Sosial Profetik sekarang ini sepatutnya mempunyai prioritas tersendiri, yaitu memecahkan persoalan umat menghadapi masyarakat industri (masyarakat kota, masyarakat global, masyarakat pengetahuan, dan masyarakat abstrak).

¹⁶ Abd. Rokhim, "Hak dan Kewajiban Politik Non-Muslim dalam Konsep Khilafah Menurut Taqiyyuddin An-Nabhani", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2010), hlm. 53.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 96.

¹⁸ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), hlm. 99.

1. Humanisasi

Dalam bahasa agama, konsep humanisasi merupakan terjemahan dari *amar al-ma'rūf*, yang mana asalnya adalah menganjurkan atau menegakkan kebajikan. Dalam Ilmu Sosial Profetik, humanisasi artinya memanusiakan manusia, menghilangkan “kebendaan”, ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari manusia.¹⁹ Humanisasi sesuai dengan semangat liberalisme Barat. Hanya saja perlu segera ditambahkan, jika peradaban Barat lahir dan bertumpu pada humanisme antroposentris, konsep humanisme Kuntowijoyo berakar pada humanisme teosentris. Karenanya, humanisasi tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memahami konsep transendensi (Tuhan) yang menjadi dasarnya.²⁰

Humanisme Barat lahir dari pemberontakan terhadap kekuasaan Gereja yang bersifat dogmatis pada abad Pertengahan. Pandangan antroposentris beranggapan bahwa kehidupan tidak berpusat pada Tuhan tapi pada manusia. Etosnya adalah semangat menghargai nilai-nilai yang dibangun oleh manusia sendiri. Peradaban antroposentris menjadikan manusia sebagai tolak ukur kebenaran dan kepalsuan, untuk memakai manusia sebagai kriteria keindahan dan untuk memberikan nilai penting pada bagian kehidupan yang menjanjikan kekuasaan dan kesenangan manusia. Antroposentrisme menganggap manusia sebagai pusat dunia, karenanya merasa cukup dengan dirinya sendiri. Manusia

¹⁹ M. Fahmi, *Islam Transendental Menelusuri Jejak-jejak Pemikiran Islam Kuntowijoyo*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm.117.

²⁰ *Ibid.*

antroposentris merasa menjadi penguasa bagi dirinya sendiri. Tidak hanya itu, ia pun bertindak lebih jauh, ia ingin menjadi penguasa bagi yang lain.²¹

Tujuan humanisasi adalah untuk memanusiakan manusia, namun saat ini terjadi dehumanisasi karena masyarakat industrial menjadikan manusia sebagai masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan. Manusia mengalami objektivasi ketika berada di tengah-tengah mesin-mesin politik dan mesin-mesin pasar.²²

Dengan rasio sebagai senjatanya, manusia antroposentris memulai sejarah kekuasaan dan eksploitasi atas alam tanpa batas. Modernisme dengan panji-panji rasionalismenya terbukti menimbulkan kerusakan alam tak terperikan terhadap alam dan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban modern menciptakan mesin-mesin perang terhadap alam berupa teknologi canggih untuk menaklukkan dan mengeksploitasi alam tanpa batas, juga mesin-mesin perang terhadap manusia berupa senjata-senjata canggih supermodern, bom, bahkan juga senjata pemusnah masal, yang membuat proses humanisasi menjadi proses dehumanisasi.²³

Kuntowijoyo lalu mengusulkan humanisme teosentris sebagai ganti humanisme antroposentris untuk mengangkat kembali martabat manusia. Dengan konsep ini, manusia harus memusatkan diri pada Tuhan, tapi

²¹ *Ibid.*, hlm. 118.

²² Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 289.

²³ M. Fahmi, *Islam Transendental Menelusuri*, hlm. 119.

tujuannya adalah untuk kepentingan manusia (kemanusiaan) sendiri.²⁴ Perkembangan peradaban manusia tidak lagi diukur dengan rasionalitas tapi transendensi. Humanisasi diperlukan karena masyarakat sedang berada dalam tiga keadaan akut yaitu dehumanisasi (obyektivasi teknologis, ekonomis, budaya dan negara), agresifitas (agresifitas kolektif dan kriminalitas) dan *loneliness* (privatisasi, individuasi).²⁵ Dehumanisasi terjadi diantaranya karena dipakainya teknologi (baik berupa alat-alat fisik maupun metode) dalam masyarakat. Agresifitas kolektif terjadi bisa karena ketidakadilan sosial yang menyebabkan kekumuhan, kemiskinan, dan pengangguran. Sedangkan *loneliness* disebabkan karena individuasi atau privatisasi yang dialami oleh kelas menengah ke atas.²⁶

2. Liberasi

Nahi munkar adalah bahasa agama. Namun oleh Kuntowijoyo istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa ilmu menjadi liberasi. Dalam bahasa agama, *nahi munkar* berarti melarang atau mencegah segala tindak kejahatan yang merusak, seperti memberantas korupsi, mengentaskan kemiskinan dan yang lain. Sedangkan dalam bahasa ilmu, *nahi munkar* berarti pembebasan dari kebodohan, kemiskinan, ataupun penindasan. Oleh karena itu, kata liberasi berarti pembebasan,²⁷ Mencegah dari yang munkar itu dapat berarti liberasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Liberasi adalah

²⁴ *Ibid.*, hlm. 122.

²⁵ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu*, hlm. 100.

²⁶ M. Fahmi, *Islam Transendental Menelusuri*, hlm. 123.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 123-124.

pendekatan revolusioner yang dalam konteks Indonesia saat ini biaya sosialnya terlalu mahal, sehingga jalan ini tidak mungkin ditempuh. Umat Islam hanya mengambil intinya yaitu usaha yang sungguh-sungguh.²⁸

Bidikan liberasi ada pada realitas empiris, sehingga liberasi sangat peka dengan persoalan penindasan atau dominasi struktural. Fenomena kemiskinan yang lahir dari ketimpangan ekonomi adalah bagian penting dari proyek liberasi. Liberasi menempatkan diri bukan pada lapangan moralitas kemanusiaan abstrak, tapi pada realitas kemanusiaan empiris, bersifat kongkrit. Kuntowijoyo bahkan menganggap sikap menghindar dari yang kongkrit menuju abstrak adalah salah satu ciri berpikir berdasarkan mitos.²⁹

Kuntowijoyo dalam bukunya menjelaskan ada empat sasaran liberasi, yaitu sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem ekonomi dan sistem politik yang membelenggu manusia sehingga tidak dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk yang merdeka dan mulia.³⁰

3. Transendensi

Transendensi merupakan dasar dari dua unsurnya yang lain. Transendensi hendak menjadikan nilai-nilai transendental (keimanan) sebagai bagian penting dari proses membangun peradaban. Transendensi

²⁸ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 38.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu*, hlm. 103.

menempatkan agama (nilai-nilai Islam) pada kedudukan yang sangat sentral dalam Ilmu Sosial Profetik.³¹

Ekses-ekses negatif yang ditimbulkan oleh modernisasi mendorong terjadinya semangat untuk mengambil alternatif yang ditawarkan oleh agama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan. Manusia produk renaissance adalah manusia antroposentris yang merasa menjadi pusat dunia, cukup dengan dirinya sendiri. Melalui proyek rasionalisasi, manusia memproklamirkan dirinya sebagai penguasa diri dan alam raya. Rasio mengajari cara berpikir bukan cara hidup. Rasio menciptakan alat-alat bukan kesadaran. Rasio mengajari manusia untuk menguasai hidup, bukan memaknainya. Akhirnya manusia menjalani kehidupannya tanpa makna.³²

Di sinilah transendensi dapat berperan penting dalam memberikan makna yang akan mengarahkan tujuan hidup manusia. Islam dapat membawakan kepada dunia yang sekarat, bukan karena kurang alat atau teknik, akan tetapi karena kekurangan maksud, arti dari masyarakat yang ingin merealisasikan rencana Tuhan. Nilai-nilai transendental ketuhanan inilah yang akan membimbing manusia menuju nilai-nilai luhur kemanusiaan.³³

Transendensi adalah dasar dari humanisasi dan liberasi. Transendensi memberi arah kemana dan untuk tujuan apa humanisasi dan liberasi itu dilakukan. Transendensi dalam Ilmu Sosial Profetik di samping berfungsi

³¹ M. Fahmi, *Islam Transendental Menelusuri*, hlm. 129

³² *Ibid.*, hlm. 130.

³³ *Ibid.*, hlm. 131.

sebagai dasar nilai bagi praksis humanisasi dan liberasi, juga berfungsi sebagai kritik. Dengan kritik transendensi, kemajuan teknik dapat diarahkan untuk mengabdikan pada perkembangan manusia dan kemanusiaan, bukan pada kehancurannya. Melalui kritik transendensi, masyarakat akan dibebaskan dari kesadaran materialistik di mana posisi ekonomi seseorang menentukan kesadarannya menuju kesadaran transendental. Transendensi akan menjadi tolak ukur kemajuan dan kemunduran manusia.³⁴

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan sebuah metode penelitian untuk membantu penulis dalam mengungkap penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif, yakni memfokuskan pada usaha untuk menggali nilai-nilai atau hakikat yang terkandung dalam suatu fenomena sosial bukan semata-mata beranalisis pada hasil-hasil survei atau pun data statistik. Dalam kesempatan ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang menggunakan sumber-sumber dari buku-buku, majalah, dokumen, naskah, dan yang lainnya, yang berkaitan dengan permasalahan dalam objek kajian penelitian ini.³⁵

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penulis akan mendeskripsikan permasalahan dalam penelitian tersebut. Kemudian menganalisa dan menjelaskan bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah terhadap pemimpin non-Muslim dalam konteksnya di Indonesia saat ini. Terkait dengan pemimpin non-Muslim, hal ini akan dijelaskan pula mengenai relevansinya dengan isu kontroversi pilkada di Indonesia.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang mengacu kepada teks, yang mana menjelaskan bagaimana pendapat Ibnu Taimiyah mengenai pemimpin non-Muslim, lalu secara empiris dikaitkan dengan pilkada di DKI Jakarta kemarin dan konteks Indonesia saat ini.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang menjadikan sasaran penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya Ibnu Taimiyah dengan bukunya yang berjudul *Al-Hisbah fi Al-Islam aw Wazhifah Al-Hukumah Al-Islamiyyah* dan *al-Siyasat al-*

Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah, dan kitab-kitab lain yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Kedua, data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai masalah-masalah yang akan diteliti pada data primer seperti halnya buku-buku, jurnal, artikel, internet, media massa, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Setelah data didapatkan, baik itu data yang bersifat primer maupun bersifat sekunder, maka data-data tersebut akan dianalisis menggunakan analisa data kualitatif. Data-data yang telah didapatkan dikualifikasikan terlebih dahulu dari yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Data yang telah diperoleh disusun dan dideskripsikan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, agar pembahasan skripsi lebih mudah dipahami, maka secara garis besar penulis akan menyajikannya dalam lima bab yang terdiri dari:

Bab I, mengenai latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang juga disebut dengan proposal.

Bab II, berisi data umum mengenai pengertian dari pemimpin, syarat-syarat yang memenuhi kriteria seseorang dapat mencalonkan diri sebagai pemimpin.

Bab III, penulis menyajikan mengenai data-data riwayat hidup dari Ibnu Taimiyah, latar belakang keluarga, pendidikan, dan karya-karya Ibnu Taimiyah, kemudian menjelaskan mengenai kriteria pemimpin menurut Ibnu Taimiyah, bagaimana pemimpin non-Muslim menurut Ibnu Taimiyah, dan pandangan para ulama tentang boleh atau tidaknya pemimpin berasal dari non-Muslim.

Bab IV, penulis akan menyajikan data mengenai kasus-kasus pemimpin non-Muslim dalam pilkada di Indonesia, kontroversi pemimpin non-Muslim dalam pilkada di DKI Jakarta, kemudian pemimpin non-Muslim dalam keadaan darurat dan menganalisis data-data tersebut dengan teori politik profetik. Pada bab inilah yang akan menjawab pokok permasalahan yang diajukan penulis.

Bab V, berisikan tentang kesimpulan terhadap hasil analisis, serta saran-saran yang kiranya relevan dan diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kontroversi mengenai pemimpin non-Muslim di negara Indonesia masih merupakan sesuatu yang hangat untuk dibicarakan, karena memang setiap ada isu pemimpin dari non-Muslim, selalu menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Mengambil pendapat Ibnu Taimiyah “Allah mendukung negara yang adil meskipun Kafir dan Allah tiak mendukung negara yang zalim meskipun Mu'min”. Pendapatnya tersebut bahwa pemimpin yang adil meskipun Kafir adalah lebih baik daripada pemimpin yang zalim meskipun Mu'min.

Dalam hal ini Ibnu Taimiyah tidak secara rinci membahas mengenai kebolehan tentang pemimpin non-Muslim dalam masyarakat yang mayoritasnya Muslim, namun Ibnu Taimiyah lebih menekankan pada aspek keadilan. Bagi Ibnu Taimiyah seorang pemimpin yang adil mampu membawa kemaslahatan terhadap rakyatnya, namun pemimpin yang zalim akan membawa masyarakatnya dan pemerintahannya menjadi hancur.

Jika ditarik dalam konteks ke-Indonesiaan, kasus yang saat ini sedang gencar diperdebatkan adalah Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta dan pencalonannya dalam pilkada tahun 2017 di DKI Jakarta. Bagi Ibnu Taimiyah selama Ahok memang mempunyai kemampuan, dan mampu bersikap adil sebagai pemimpin, maka tidak menjadi masalah apabila ia dipilih. Namun jika melihat konteksnya Ahok dalam kinerjanya ketika menjadi pemimpin DKI Jakarta yang

menimbulkan kontroversi dalam masyarakat dan membuat masyarakat geram terhadapnya, maka ia tidak boleh dipilih menjadi pemimpin, karena dikhawatirkan jika Ahok menjadi pemimpin, maka kepentingan umat Islam tidak terpenuhi justru kepentingan individu dan golongannya yang terpenuhi, dan masyarakat Muslim tidak mendapatkan hak-haknya sebagai rakyat. Kemudian tidak adanya perwujudan kesejahteraan terhadap sebagian besar masyarakat DKI Jakarta yang mayoritasnya Muslim.

Kaitannya dengan ini, non-Muslim dalam keadaan darurat dan non-Muslim dalam keadaan normal sangat jauh berbeda. Pada pengangkatan Ahok sebagai gubernur menggantikan Jokowi, bagi Ibnu Taimiyah kondisi tersebut dapat dikatakan dalam keadaan darurat, karena secara otomatis ia naik menjadi gubernur DKI Jakarta. Apabila Ahok tidak menggantikan Jokowi, maka Jakarta akan mengalami kekosongan kekuasaan, dan dapat menimbulkan kacaunya pemerintahan pada saat itu. Namun konteksnya berbeda ketika pencalonan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta tahun 2017 kemarin. Di mana ia melawan pasangan Anis Baswedan dan Sandiaga Uno yang merupakan seorang Muslim dan mempunyai kualitas menjadi pemimpin serta memenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu Ahok tidak boleh dipilih menjadi gubernur karena masih terdapat pasangan calon yang memenuhi persyaratan menjadi pemimpin dan beragama Islam.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa sedikit karya yang penulis hasilkan dari penelitian yang berjudul “Pemimpin Non-Muslim menurut Ibnu Taimiyah dan Relevansinya dengan Kontroversi Pilkada di DKI Jakarta tahun 2017” ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Keterbatasan waktu, jarak, kemampuan dan tenaga dalam rangka memaksimalkan penelitian, membuat skripsi ini masih begitu banyak kekurangan. Selain itu, dalam dunia penelitian, penulis masih sangat terbatas pada pengalaman, sehingga skripsi yang penulis hasilkan belum maksimal. Oleh karena itu, kritik dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini sangat penulis butuhkan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang belum penulis sempurnakan. Hal ini juga diperlukan dalam rangka mengembangkan kemampuan penulis dalam dunia penelitian, serta dapat mengembangkan khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan tema yang penulis ambil dalam penelitian ini.

Penulis berharap akan ada peneliti yang tertarik dan berminat menyempurnakan penelitian ini dari berbagai sudut pandang. Bahkan mungkin bisa menggali lebih dalam mengenai data-data Ahok sebagai contoh pemimpin non-Muslim masa sekarang, dengan mengambil konsep keadilan menurut Ibnu Taimiyah, dan ilmu sosial profetik menurut Kuntowijoyo. Hal ini sangat penting untuk dijadikan rujukan yang baik oleh setiap para pemimpin dan politisi yang ingin terjun dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2006.

B. Al-Hadits

al-Bukhari, Imam. *Shahih al-Bukhari*. Jilid 3. Cet. Ke-1. Terj. Muhamad Iqbal , Lc dan Ma'ruf Abdul Jalil. Jakarta: Pustaka as Sunnah, 2010.

C. Fiqih dan Ushul Fiqih

Amin, Muhammad. *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Bidang Fiqih Islam*. Jakarta: INIS, 1991.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

as-Salus, Ali. *Imamah dan Khilafah dalam Tinjauan Syar'i*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Ibn Taimiyah. *Al-Hisbah fi al-Islam aw Wadhifah al-Hukumah al-Islamiyyah*. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.

----- *Al Iman*. Kairo, Dar al Hadith, 2003.

----- *al-Siyyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'I wa al-Ra'iyah*. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.

----- *Kitab al-Taubah*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1996.

----- *Majmu' al-Fatawa Syaikh al-Islam Taqiyuddin Ibn Taimiyah*. Edisi ke-35. Jilid 18. Beirut: Dar al Wafa', 2001.

Khan, Qamaruddin. *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*. Cet. I. Terj. Anas Mahyudin,. Bandung: Pustaka, 1995.

Muthahhari, Murtadha. *Imamah dan Khilafah*. Jakarta: Firdaus, 1991.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Syadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Edisi Kelima. Jakarta: UI Press, 1993.

D. Lain-lain

1. Buku Umum

Abdul Rojak, Jeje. *Politik Kenegaraan: Pemikiran-pemikiran Al-Ghazali dan Ibn Taimiyah*. Cet. Ke-1. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999.

Binder, Leonard. *Islam Liberal: Kritik Terhadap Ideologi-Ideologi Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Depdikbud Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Cet. ke-3. Terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Fahmi, M. *Islam Transendental Menelusuri Jejak-jejak Pemikiran Islam Kuntowijoyo*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Ibn Taimiyah. *Risalah Ibnu Taimiyah Tentang Tafsir Al-Qur'an*. Cet. I. Terj. As'ad Yasin, Zaini Munir Fadhal, dan Setiadi. Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1996.

---- *Tugas Negara Menurut Islam*. Cet. Ke-1. Terj. Arif Maftuhin Dzofir. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Ibrahim Jindan, Khalid. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Terj. Masrohin. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1997.

---- *Islam sebagai Ilmu Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

---- *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1991.

Moch. Fachruddin, Fuad. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1988.

Mutahar, Ali. *Kamus Arab Indonesia*. Mizan: Jakarta, 2005.

Nawawi, Hadari. *Kepemimpinan Menurut Islam*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.

Permadi. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.

Qardhawi, Yusuf. *Minoritas Non Muslim di dalam Masyarakat Islam*. Bandung: Karisma, 1994.

Rahman, Taufiq. *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Salim P, Arskal. *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos, 1999.

Syarif, Mujar Ibnu. *Presiden Non Muslim di Negara Muslim (Tinjauan dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.

2. Skripsi dan Thesis

Firmansyah, Ardhian Wahyu. "Pemimpin Non-Muslim di Indonesia Menurut Pandangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (2012-2013)". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Naldi, Wahyu. "Penafsiran terhadap Ayat-ayat Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim dalam Al-Qur'an: Studi Komparasi antara M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Rokhim, Abd. "Hak dan Kewajiban Politik Non-Muslim dalam Konsep Khilafah Menurut Taqiyyuddin An-Nabhani". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Sugiharto. "Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Bai'at dan Relevansinya dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

3. Jurnal dan Surat Kabar

Ibnu Syarif, Mujar. "Memilih Presiden Non-Muslim di Negara Muslim dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, November, 2008.

Thalib Khalik, Abu. "Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Ibnu Taimiyah". *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 14, Nomor 1, Juni, 2014.

M. Suryadinata, "Kepemimpinan Non-Muslim dalam al-Qur'an: Analisis terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Volume 2, Nomer 3, Januari-Juni 2015.

Tim Keputusan Bahtsul Masail Kyai Muda Anzor, *Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia*, Jl. Kramat Raya No. 65A, Jakarta Pusat, pada tanggal 11-12 Maret 2017.

4. Website

Agung Supriyanto, *MUI Minta Pemda DKI Sediakan Masjid Sementara di sekitar Rusun Jatinegara*, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara> diakses pada tanggal 18 Mei pukul 18.04.

Alhafiz K, *Kontroversi Pemimpin Non-Muslim ini Klarifikasi Pernyataan Kang Said*, <http://www.nu.or.id/post/read/67660/> diakses pada tanggal 23 Mei 2017 pukul 16.01.

Bima Setiyadi, *Penggusuran yang Dilakukan Ahok tidak Menyelesaikan Masalah*, <https://metro.sindonews.com/read/> diakses pada tanggal 18 Mei 2017 pukul 17.44.

Dhanang Dhawe, *Hadi Rudyatmo Preman Yang Menjadi Pelayan*, [http : // www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) diakses pada tanggal 26 April 2017 pukul 13.11.

Effendi Harahap, Muchtar. *Gelombang Aksi Demo Umat Islam di Jakarta*, <http://muchtareffendiharahap.blogspot.co.id/2016/12/.html> , diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 12.10.

Feronika. *Profil Hendrik Hermanus Joel Ngantung*, <https://profil.merdeka.com/indonesia> diakses pada tanggal 20 April 2017 pukul 12.43.

Fuji Astuti. *Jelang Pilgub, Tolak Ahok Semakin Panas*. [http : // www.kompasiana.com /](http://www.kompasiana.com/) diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 11.58.

Imam Solehudin, *Daftar Gubernur DKI Jakarta dari Masa ke Masa*, <http://www.jawapos.com/read/2017/04/19/124393/> diakses pada tanggal 6 Mei 2017 pukul 11.35.

Mamor Adi Pradhana dan Mochamad Nasrul Chotib, *Agustin Teras Narang*, <https://profil.merdeka.com/indonesia/>, diakses pada tanggal 27 April 2017 pukul 13.27.

Pijar Anugerah. *Lima Hal Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Unjuk Rasa 2 Desember* <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia>, diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 13.12.

Suryo Basuindro, *Mengenal Hadi Rudyatmo Wawali Solo*, [http : // www.kompasiana.com/](http://www.kompasiana.com/) diakses pada tanggal 19 April 2017 pukul 15.18.



DAFTAR TERJEMAHAN

No	HALAMAN	BAB	FN	TERJEMAHAN
1	2	I	1	Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia (mu), mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
2	2	I	2	Janganlah orang-orang Mu'min mengambil orang-orang Kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang Mu'min. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu).
3	2	I	3	Sesungguhnya Allah mendirikan (mendukung) negara yang adil meskipun negara itu Kafir, dan Allah tidak mendukung (negara) yang dzalim sekalipun negara itu Mu'min.
4	25	II	22	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan orang-orang yang berkuasa dari kalanganmu sendiri.
5	26	II	24	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.....
6	26	II	25	Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpinnya". (H.R. al-Bukhari).
7	28	II	29	Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia menyesatkan kamu dari jalan Allah.
8	28	II	30	Berkata Yusuf: jadikanlah aku sebagai bendaharawan Negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah lagi berpengalaman.
9	29	II	34Sesungguhnya orang yang paling baik

				yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.
10	30	II	37 Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah (ke negara Islam) maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu untuk memberikan (hak) kekuasaan kepada mereka sebelum mereka berhijrah....
11	49	III	51	Janganlah orang-orang Mu'min mengambil orang-orang Kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang Mu'min. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu).
12	64	IV	8	Janganlah orang-orang Mu'min mengambil orang-orang Kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang Mu'min.
13	64	IV	9	Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

CURRICULUM VITAE

Nama : Lulu Nadziroh
Tempat/Tgl. Lahir : Kebumen, 28 Desember 1994
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Klapasawit, Rt. 01/Rw. 06, Kec. Buluspesantren, Kab. Kebumen, Jawa Tengah
CP : 08562990269
Email : nadzirohlulu@gmail.com
Ayah : Mokhammad Sarwadi
Ibu : Isnani
Saudara : 'Afifatun Niswah, Zaqi Khasan

Riwayat Pendidikan Formal

1. SD Negeri 3 Klapasawit (2001-2007)
2. SMP Negeri 1 Buluspesantren (2007-2010)
3. SMA Negeri 1 Kutowinangun (2010-2013)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-sekarang)